

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Haryanto, dkk. (2017: 1) menyatakan bahwa, Akuntansi Sektor Publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, Akuntansi Sektor Publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Lebih lanjut Bastian (2014: 2) menyatakan bahwa, Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemendepartemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Biduri (2018: 2) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2014: 3) bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah,

LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.2. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, Akuntansi Sektor Publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut Biduri (2018: 5) antara lain

- 1) Faktor ekonomi meliputi antara lain: a) Pertumbuhan ekonomi b) Tingkat inflasi c) Tenaga kerja d) Nilai tukar mata uang e) Infrastruktur f) Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
- 2) Faktor politik meliputi antara lain: a) Hubungan negara dan masyarakat b) Legitimasi pemerintah c) Tipe rezim yang berkuasa d) Ideologi negara e) Elit politik dan massa f) Jaringan internasional g) Kelembagaan

- 3) Faktor kultural meliputi antara lain: a) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya b) Sistem nilai di masyarakat c) Historis d) Sosiologi masyarakat e) Karakteristik masyarakat f) Tingkat pendidikan
- 4) Faktor demografi meliputi antara lain: a) Pertumbuhan penduduk b) Struktur usia penduduk c) Migrasi d) Tingkat kesehatan d. Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik.

Menurut Bastian (2014: 12) Akuntansi Sektor Publik memiliki elemen-elemen sebagai berikut.

- 1) Perencanaan Publik

Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta berterimanya arah dan tujuan organisasi. Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini.

Maka, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

karena hakikat dan tujuan publik adalah kesejahteraan publik. Otomatis, tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematis.

2) Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara. Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran.

Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Tidak hanya itu, kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh kebijakan keuangan secara menyeluruh yang ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi, dukungan politis berbagai lembaga, dan akurasi perencanaan, terutama penganggaran yang dipengaruhi teknik review perkiraan anggaran. Topik selanjutnya adalah realisasi anggaran publik.

3) Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan

nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran. Perlu diketahui, realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri atas kegiatan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. Siklus tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa public.

4) Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat

5) Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Selanjutnya, perlu diketahui beberapa komponen laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas yang dilengkapi catatan

atas laporan keuangan, ataupun laporan tambahan lainnya, seperti laporan tahunan dan prospektus.

6) Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), instansi Inspektorat pengelola aset negara lainnya, ataupun organisasi publik nonpemerintah, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini. Dikaji dari perspektif proses, audit berhubungan erat dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh berbagai organisasi sektor publik dan pemerintahan. Pihak-pihak tertentu, sebagai contoh auditor dan pengawas, wajib memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pemeriksaan yang memang terlebih dahulu diprioritaskan, apa lagi pada pemahaman tentang sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi publik. Agar pemeriksaan berjalan lebih efisien, efektif, dan ekonomis, organisasi publik juga harus memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait audit yang akan dilakukan oleh auditor.

7) Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

2.1.1.3. Indikator Akuntansi Sektor Publik

Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Menurut Bastian (2014: 318-319) siklus akuntansi keuangan sektor publik antara lain:

- 1) Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain.

Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.

- 2) Analisis bukti transaksi

Setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti inilah yang kemudian akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

- 3) Pencatatan data transaksi

Dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4) Pengikhtisaran

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.

5) Pelaporan

Selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor public yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

2.1.2 Pengawasan Internal

2.1.2.1 Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Ulum, 2014:133). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa: pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Siagian dikutip (Kadarisman, 2013: 172) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2014: 370) pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi.

Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakantindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol (Simbolon, 2013: 61). Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa pengawasan internal kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2.1.2.2. Tahap-tahap Proses Pengawasan Internal

Reksohadiprodjo dan Indriyo (2012: 63) menjelaskan bahwa pertama kali orang harus menentukan standar pengawasan pada pusat-pusat yang strategis, oleh karena orang tidak dapat mengecek segalanya. Harus dibedakan hal apa yang dapat diawasi, dan hal apa yang tidak dapat diawasi. Kemudian diadakan pengecekan dan laporan kegiatan kerja. Dalam beberapa hal manajemen perlu meninjau hasil kerja karyawan. Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan secara tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan. Langsung diadakan pemeriksaan segera mana atau apa yang salah. Ini semua perlu tindakan korektif. Dianalisa apakah sebab-sebabnya itu datang dari luar, ataukah salah organisasi sendiri dalam memilih karyawan, atau mungkin rencananya sendiri yang harus diubah, atau soal motivasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses pengawasan internal.

Menurut Handoko (2013: 363) 1), tahapan Proses Pengawasan Internal meliputi:

Tahap 1: Penetapan standar Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kouta dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Tahap 2: Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

Tahap 3: Pengukuran pelaksanaan kegiatan Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.

Tahap 4: Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

Tahap 5: Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Jelasnya, pengawasan internal memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Penetapan standar kerja adalah ukuran yang menjadi dasar untuk melakukan pekerjaan 2) Penilaian kerja adalah upaya untuk menilai pekerjaan yang dilakukan atasan terhadap hasil pekerjaan karyawan 3) Mengoreksi pekerjaan adalah membandingkan hasil pekerjaan dengan standar kerja yang ditentukan sebelumnya.

2.1.2.3. Indikator Pengawasan Internal

Swayer's (2005: 49) menyebutkan beberapa sarana operasional yang dapat digunakan manager untuk mengontrol fungsi di dalam sebuah instansi Inspektorat adalah:

- 1) Organisasi (*organization*), organisasi sebagai sarana kontrol, merupakan struktur peran yang dituju untuk orang-orang di dalam sebuah instansi Inspektorat, sehingga sebuah instansi Inspektorat dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis.
- 2) Kebijakan (*policy*), suatu kebijakan adalah pernyataan prinsip yang dibutuhkan, menjadi pedoman atau membatasi tindakan.
- 3) Prosedur (*procedure*), merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- 4) Personalia (*personnel*), Orang-orang yang diperkerjakan atau ditugaskan harus memiliki kualifikasi untuk melakukan tugas yang diberikan. Bentuk kontrol yang baik disamping kinerja masing-masing individu adalah supervise. Jadi, standar supervise harus ditetapkan.
- 5) Akuntansi (*accounting*), merupakan sarana yang sangat penting untuk kontrol keuangan pada aktivitas dan sumber daya.
- 6) Penganggaran (*budgeting*), merupakan suatu pernyataan hasil-hasil yang diharapkan dinyatakan dalam bentuk numerik. Sebagai sebuah kontrol, anggaran menetapkan standar masukan sumber daya dan halhal yang harus dicapai sebagai keluaran.

7) Pelaporan, kebanyakan organisasi, manajemen berfungsi membuat keputusan berdasarkan laporan yang diterima. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis.

2.1.3. Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah

2.1.3.1. Pengertian Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah

Menurut Mulyadi (2015: 63) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan menurut Sutrisno (2015: 151) kinerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2.1.3.2. Manfaat Kinerja Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009: 7) bahwa manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut.

- 1) Pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang Memberikan telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi Inspektorat pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.3.3. Pengukuran Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah

Biduri (2018: 139) menyatakan bahwa indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Mardiasmo dikutip (Biduri, 2018: 139) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment systems. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud sebagai berikut.

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian Pelayanan publik.
- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.3.4. Indikator Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009: 21), *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Lebih lanjut Haryanto, dkk. (2017:18) menyatakan bahwa salah satu tuntutan terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap penerapan konsep *value for money* dalam aktivitas organisasi sektor publik. *Value For money* merupakan konsep pengelolaan organisasi

sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomi

Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut di atas, merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup.

Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata

(*equality*). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki Akuntansi Sektor Publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.

Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain: 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik; 3) Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input; 4) Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik; 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.1.4. Hubungan Antar Variabel

2.1.4.1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja

Instansi Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten OKU

Akuntansi Sektor Publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Penerapan

akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap good government governance. Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi pemerintahan maka kualitas informasi akuntansi akan semakin tinggi pula. Penerapan akuntansi pemerintahan yang baik dan berkualitasnya informasi akuntansi menunjukkan adanya kinerja pemerintahan yang baik pula (Saragih, 2017:32).

Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto, dkk., 2017:1).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, instansi pemerintah telah melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keuangan kepada publik. Laporan yang dibuat kemudian diaudit untuk mengetahui kebenarannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas, diduga bahwa peranan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten OKU.

2.1.4.2. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten OKU

Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan dengan laporan keuangan ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Untuk mewujudkan kinerja instansi Inspektorat yang sesuai *value for money (economy, efficiency, effective)*, perlu peningkatan peran fungsi aparat pemeriksa fungsional pemerintah (Mardiasmo, 2018). Fungsi aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pengawasan intern (*internal control*) yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan.

Ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 pasal 41 (1) yaitu pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah atas nama kepala daerah. Demikian pula dalam keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001 pasal (6), dinyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Ponamon, 2013)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi Inspektorat pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.1 Berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, No, Tahun	Variabel yang diteliti, alat analisis, hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Bambang Pamungkas	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen.. Volume 12 (2) Tahun 2012	Variabel :Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukan Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Lokasi Penelitian

			<p>keuangan baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah baik secara parsial maupun simultan.</p>		
2	Putri	<p>Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Volume 1 (1) Tahun 2015</p>	<p>Variabel: Penerapan Akuntansi Sektor Publik. Pengawasan Internal, Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2015. Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Hasil Analisis: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik memberikan pengaruh terhadap kinerja</p>	<p>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda</p>	<p>Lokasi Penelitian</p>

			<p>instansi pemerintah sebesar 32,6% dan pengaruh tidak langsung akuntansi akibat adanya hubungan pengawasan internal sebesar 12,2% maka besar pengaruhnya 44,8%. Pengawasan internal memberikan pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 7,9%, dan pengaruh tidak langsung sebesar 12,2% maka besar pengaruhnya adalah 20,1%.</p>		
3	Intan Permata Haska Wina	Pengaruh Penerapan standar pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah (Studi Kasus Dispenda	Variabel: Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Lokasi Penelitian

		Kota dan Dishub Prov). Jurnal Akuntansi Volume 2 (2) Tahun 2015	Tahun:2015 Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Hasil Penelitian: Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov)		
4	M.Hafiz Reyhan	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Propinsi Sumatera Utara).	Variabel: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Lokasi Penelitian

		Skripsi Tahun 2017	<p>Hasil Analisis: Hasil Penelitian Ini Membuktikan Bahwa Secara Simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Pemerintah Propinsi Sumatera Utara). Secara Parsial Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dan Variabel</p>		
--	--	-----------------------	--	--	--

			Kualitas Laporan Keuangan Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.		
5	Nurhani Salamah	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kabupaten Bogor). Jurnal Akuntansi Volume 2 (6) Tahun 2020	Variabel: Penerapan Akuntansi Sektor Publik ,Pengawasan Internal, Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, hal ini disebabkan SKPD Kabupaten Bogor belum mempunyai bahan dalam pengambilan	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Lokasi Penelitian

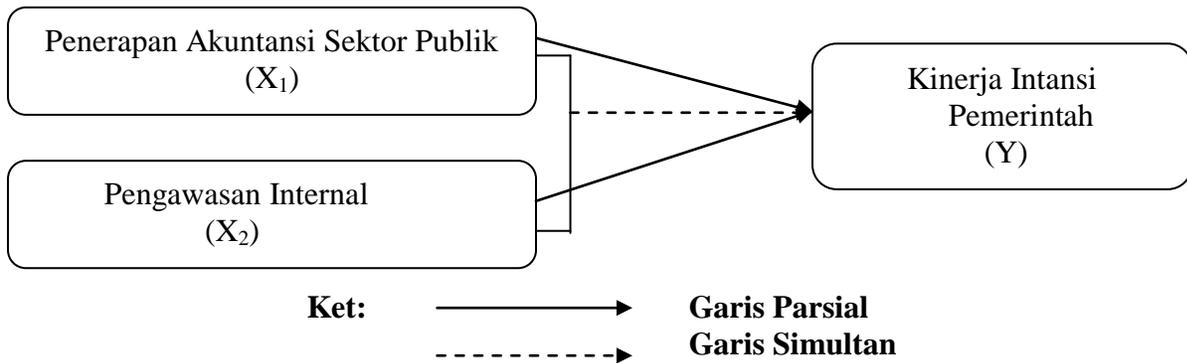
			<p>keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik. Akuntabilitas dari masing-masing SKPD masih rendah sehingga akan mempengaruhi kinerjanya. Pada pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan, Sehingga untuk meningkatkan kinerja adalah dengan meningkatkan pengawasan karena dengan pengawasan yang optimal akan berdampak baik pada kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penerapan akuntansi sektor publik dan</p>		
--	--	--	---	--	--

			pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.		
--	--	--	---	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambaran kerangka pemikiran ini dapat lebih jelas dilihat pada gambar berikut:

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto (2012: 60) hipotesis didefinisikan sebagai persyaratan yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis adalah sebuah jawaban sementara, masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: diduga ada Pengaruh signifikan Penerapan Akuntansi

Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat

Pemerintah Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan.